

Penanganan Anak Rawan Pendidikan di Daerah Terpencil

Sundoyo Pitomo

Abstract: This study was an effort to seek a solution in handling the uneducated children in the context of nine-year compulsory education. It was carried out in Hargobelah, Nganjuk, East Java. Data were collected from the uneducated children, parents and formal or informal leaders by questionnaire, interview, group discussion, and documentary study. Quantitative-percentage technique was applied to analyze the data. The main solution suggested was that the children should be involved in a job training program with financial incentives and, at the same time, be participated in Package A/B programs.

Kata kunci: rawan pendidikan, daerah terpencil, latihan, Paket A/B.

Berbagai data dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun menunjukkan bahwa di daerah terpencil masih banyak terdapat anak rawan pendidikan (ARP). Di daerah tersebut angka putus sekolah, angka mengulang kelas dan angka absensi masih tinggi, sedang angka partisipasi dan angka transisi SD-SLTP rendah. Hal itu dapat mempengaruhi program Wajar 9 Tahun. (Roesminingsih, 1993; Partosoedjono dkk., 1995; Pitomo dkk., 1997).

Untuk mengatasi hal tersebut telah banyak dilakukan penelitian, baik dalam rangka melihat kesiapan dan permasalahannya maupun kemungkinan penyelesaiannya. Ada pula yang melihat masalah menaikkan angka transit dan aspeknya. Hasil kajian menunjukkan bahwa jalur sekolah formal dan

Sundoyo Pitomo adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Surabaya.

nonformal ternyata belum mampu mengurangi ARP di daerah terpencil. Upaya tradisional itu ternyata penuh hambatan seperti mutu proses dan hasil belajar, mutu dan penyebaran guru, mutu sarana dan prasarana serta jumlah ARP.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan adalah rendahnya tingkat sosial ekonomi orang tua, sulit dan jauhnya jarak sekolah dengan tempat tinggal anak (Pitomo dkk., 1997), di samping alasan akses, sinyal pasar kerja, aspirasi pendidikan orang tua dan anak serta mutu SLTP (Soebagyo dkk., 1993). Bagi keluarga, ARP khususnya anak yang lulus SD adalah tenaga produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan keluarga. Lebih-lebih keluarga mereka berpenghasilan rendah (Partosoedjono dkk., 1995; Pitomo dkk., 1992). Desa Hargobelah, Kabupaten Nganjuk, juga menunjukkan situasi yang sama dan lebih menyedihkan. Banyak ARP dan setiap tahun jumlahnya bertambah, dan berkurang hanya kalau ARP keluar desa. Sekolah formal dan Paket A/B serta SD kecil belum mampu mengerem meningkatnya ARP.

Menghadapi masalah tersebut di atas perlu dicari solusi agar ARP di daerah terpencil bisa dipecahkan. Secara teoretis dalam pembangunan pedesaan dan peningkatan pendidikan dikenal pendekatan penyuluhan, diklat, koperasi swadaya, dan pembangunan terpadu (Coombs & Ahmed, 1984). Ada pula pendekatan pembangunan desa dari belakang (Chambers, 1987), tetapi semuanya masih perlu dijabarkan lebih rinci, dan tidak mungkin memilih salah satu untuk diterapkan, karena sasaran upaya ini adalah ganda, menyekolahkan ARP dan membangun pedesaan.

Kajian program Lintas Sektoral Lintas Disiplin (LSLD) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kurang mengarah ke sasaran ARP dan kurang koordinatif dan terpadu, dan belum menjurus ke sasaran inti, yaitu kondisi ekonomi orang tua dan jauhnya lokasi. Sedang program Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya lebih berorientasi kepada pembangunan fisik, dan komponen pendidikan belum dijadikan sasaran utama meskipun keterpaduan dan kontinuitas telah ditingkatkan (UWP, 1998). Alasan di atas mendorong dicarinya solusi dalam upaya menangani anak rawan pendidikan dengan memanfaatkan potensi daerah.

METODE

Studi ini adalah penelitian deskriptif berbentuk survei lapangan dan kajian teoretis dengan mempertimbangkan aspek praktis. Studi ini mencoba

mengumpulkan data dan informasi dari hasil penelitian serta pengalaman lapangan sebagai anggota Tim Program LSLD dan tim Kegiatan Peningkatan Pendapatan serta anggota Tim Kaji Tindak UWP Surabaya.

Lokasi survei di desa Hargobelah, Kabupaten Nganjuk, yang merupakan salah satu desa binaan Program LSLD Unesa. Subjek penelitian adalah para ARP, orang tua, tokoh masyarakat informal, dan pejabat pemerintah.

Pengumpulan data menggunakan angket kepada ARP dan tokoh masyarakat, wawancara bebas dengan orang tua, pejabat, dan para peneliti serta dokumentasi, sedang diskusi kelompok dilaksanakan untuk mencari alasan tiap pemecahan masalah ARP. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.

HASIL

Dari sisi makro, banyak laporan yang menunjukkan peningkatan dan pengurangan ARP (Soetrisno, 1995), tetapi kalau dicermati khususnya di daerah terpencil, akan terjadi situasi sebaliknya. Di desa Hargobelah, diperoleh data seperti dalam tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Anak Rawan Pendidikan Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Umur	L	P	L dan P	Jumlah
1.	10	1	-	1	
2.	11	1	1	2	
3.	12	11	13	24	27
4.	13	28	37	65	
5.	14	47	36	83	
6.	15	61	13	74	222
7.	16	10	1	11	
8.	17	3	3	6	
9.	18	9	2	11	
10.	19	0	3	3	31
	Jumlah	171	109	280	280

Data di atas berasal dari 11 dukuh (dari 21 dukuh). Jumlah ARP perempuan usia muda (12 tahun ke bawah) lebih banyak daripada anak laki-laki. Keadaan menjadi terbalik pada usia 13 tahun ke atas, jumlah anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Apakah ini menunjukkan bahwa anak perempuan yang agak besar pergi mencari pekerjaan atau menjadi pembantu rumah tangga di kota, masih menjadi pertanyaan. Yang jelas jumlah ARP tersebut cukup mengagetkan para pejabat. Mereka menyatakan jumlah ARP di dukuh-dukuh itu memang banyak, tetapi kenyataannya mereka tidak ada di dukuh (Pitomo dkk., 1997). Pernyataan itu perlu dievaluasi melalui sensus.

Sebagian besar ARP (74,29%) menyatakan tidak bersekolah karena tidak ada biaya, jarak sekolah jauh (17,29%) dan membantu orang tua bekerja (8,57%). Tokoh masyarakat juga menyatakan alasan demikian, di samping tidak ada motivasi dan malas sekolah. Begitu juga pendapat pejabat, di samping mereka berpendapat kurang kesadaran orang tua, dan anak malas sekolah. Mereka yang tidak melanjutkan sekolah sebagian besar (45,7%) belum bekerja, sedikit sekali (2,86%) yang sudah bekerja, sisanya tidak memberi jawaban. Kegiatan mereka adalah membantu orangtua bekerja (48,6%), sisanya tidak menjawab. Data di atas jumlahnya akan lebih besar lagi jika dilakukan sensus di seluruh dukuh.

Pada 1995 ada 23 lulusan SD tidak bersekolah; keadaan sosial ekonomi orangtua mereka rendah, berdampak anak membantu bekerja orangtua dan berhenti sekolah. Jauhnya letak sekolah dari tempat tinggal mereka merupakan masalah khusus yang perlu dicari solusi yang dapat menjadi "tombak bermata tiga", yang dapat menyerang langsung ke inti persoalan di atas. Di samping itu solusi tersebut bukan hanya cocok dikaji secara teoretis tetapi sesuai dengan kondisi dan situasi daerah serta sesuai dengan keinginan mereka. Tanpa pertimbangan di atas, solusi itu akan tidak mempan.

Beberapa pendekatan yang pernah dilaksanakan, seperti pendekatan penyuluhan, baik konvensional maupun konvensional mutakhir, titik beratnya adalah penyuluhan pertanian, meskipun tidak meninggalkan pendidikan. Demikian pula pengalaman pendekatan diklat khusus pertanian, pendekatan diklat khusus luar pertanian, adalah bercorak ragam yang menurut penilaian Coombs dan Ahmed tidak tersedia model-model pendidikan yang mantap yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam penyuluhan dan diklat ini sering para pelaksananya *angkuh* karena merasa memiliki ilmu, yang hal ini menutup ilmu yang bersumber dari kaum miskin (Chambers, 1987).

Menangani ARP di desa terpencil seperti Hargobelah, dipergunakan program yang mengarah pada masalah inti yaitu rendahnya kondisi sosial ekonomi keluarga ARP (karena ARP adalah tenaga produktif), jauhnya jarak tempat sekolah, dan tidak adanya dana yang dihasilkan untuk menyekolahkan dan melatih kerja ARP. Di samping itu pengelolaan dan pelaksanaan program komprehensif dan pengawasan secara terus menerus.

Adapun kegiatannya adalah melaksanakan budidaya pertanian, peternakan serta ikan air deras yang dapat menghasilkan dan membelajarkan ARP dengan Paket A dan B serta melatih kerja ARP dengan diberi insentif. Di dalam budidaya ini perlu disiapkan sarana prasarana produksi yang berkualitas, serta pemasaran dengan melalui koperasi.

Dalam pengelolaan program, pihak pemberi dana (pemerintah atau swasta) menjadi pengawas dan evaluator keberhasilan program. Seorang manajer profesional memimpin program, dengan dibantu oleh ahli, staf pelaksana yang berfungsi ganda, sebagai pimpinan budidaya dan juga menjadi tutor Paket A/B. ARP yang sedang belajar paket A/B membantu (dilatih) dalam budidaya secara bergiliran. Pengaturan ini dapat diubah sesuai dengan usia dan tugas anak.

Berdasarkan pengalaman LSLD, budidaya yang dikembangkan adalah ikan air deras, ternak ayam buras, itik, kambing serta pertanian sebagai pendukung program. Budidaya ini dapat dikembangkan dengan kerajinan menurut kondisi dan potensi desa. Menurut pengalaman tim Kegiatan Peningkatan Pendapatan Program LSLD, masing-masing budidaya tadi berhasil baik dan menguntungkan (Adikara dkk., 1998; Hardiyanto dkk., 1998; Mursito dkk., 1998; Pitomo dkk., 1997).

Hasil kegiatan dimanfaatkan untuk memberikan insentif kepada ARP dan orang tua, para pelaksana dan untuk biaya operasional program. Menurut analisis ahli akuntansi, jika dikelola dengan baik, budidaya tersebut cukup mampu membiayai diri sendiri. Sebelum dilaksanakan, perlu dilakukan penelitian mendalam dan studi kelayakan.

Staf ahli melatih pelaksana dengan *on the job training*, sedang staf pelaksana juga melatih ARP dan orang tua. Jika sudah berjalan, pelatihan juga dapat diberikan kepada orang lain agar dapat melaksanakan budidaya di desa sesuai dengan kemampuannya.

Kegiatan pendidikan di samping pelatihan adalah melaksanakan Paket A/B kepada ARP yang mengikuti program. Pelaksanaannya diatur dengan tugas berlatih bekerja. Karena ARP tinggal di tempat program, maka waktu

dapat dimanfaatkan secara penuh. Kegiatan di atas memerlukan fasilitas seperti asrama sederhana, kelas untuk penyuluhan dan pelatihan serta ladang untuk pertanian dan percobaan serta tempat praktik budidaya.

Dana pada awalnya diperoleh dari pemerintah atau dari swasta di dalam dan luar negeri, dan setelah berjalan program dapat membiayai usaha sendiri.

PEMBAHASAN

Solusi melatih bekerja dan membelajarkan ARP merupakan ramuan dan penyempurnaan program LSLD Unesa yang dipadu dengan pengalaman dari tempat lain. Melalui solusi ini kelemahan LSLD Unesa diperbaiki. Beberapa alasan yang mendukung solusi ini dan dapat dikatakan sebagai kekuatan solusi adalah solusi ini mengarah langsung kepada inti persoalan ARP yaitu dipecahkannya biaya pendidikan yang berat serta anak sebagai faktor produksi keluarga.

Sejalan dengan gagasan itu, Bernstein telah menulis tentang *money incentives for learners*. Menurut Bernstein, Rusia telah membayar siswanya. Skinner telah membiayai hidup tikus dan burung merpatinya sebagai binatang coba untuk belajar dan percobaan dan demikian pula untuk eksperimennya ia telah membayar subjek penelitiannya untuk belajar (1987:155). Mengapa anak tidak mampu yang mau belajar tidak diberi insentif.

Anak yang ikut program ini dilatih bekerja di samping belajar. Mereka harus bekerja di suatu lembaga yang mengurus kebutuhan mereka. Cara demikian mengacu kepada sistem *nyantrik* atau *pondok pesantren*. Mereka bekerja mandiri dan belajar. Perbedaannya, di pondok mereka harus membayar, sedang di lembaga ini mereka malah diberi upah.

Imbalan belajar ini dapat diberikan kepada ARP atau orang tua ARP atau sebagian ARP sebagian orang tua ARP. Pemberian insentif kepada orang tua ARP dapat sebagian tiap bulan atau sebagian lagi berupa uang atau natura (ayam, kambing atau itik) yang akan dipelihara di rumah, setelah orang tua dilatih.

Masalah jarak jauh dan sulit antara sekolah dan tempat tinggal juga terpecahkan. ARP berlatih bekerja dan belajar Paket A/B di asrama. Pengawasan kontinu atas kegiatan belajarpun dapat ditingkatkan dan putus belajar dapat ditekan serendah mungkin. Pernyataan itu didukung oleh jawaban atas pertanyaan dalam mencari kemungkinan mereka dilatih bekerja sambil belajar Paket A/B. Responden sebagian besar (57,14%) menjawab bersedia,

asalkan tidak jauh dari desa dan 5,71% bersedia dilatih di mana saja, sisanya tidak memberi jawaban. Jika dilatih, mereka mengharapkan latihan keterampilan beternak (25,7%), bertani (20%), kerajinan (20%), berdagang (11,4%), budidaya ikan (2,86%), serta boga dan busana (2,86%). Mereka masih mau melanjutkan pendidikan (43%), sisanya tidak mau menjawab. Mereka mau ikut Paket A/B asalkan di dekat tempat tinggal, meskipun ada (16%) yang menjawab bersedia di mana saja. Mengenai wujud imbalan belajar, jawaban mereka bervariasi: belajar gratis (28%), uang (17,1%), ternak (17,1%), dan bantuan bahan (8,57%), sisanya tidak memberi pernyataan.

Jika ada yang memberinya pekerjaan, sebagian besar (45,71%) menjawab bersedia, meskipun besar pula yang tidak memberikan jawaban. Bahkan mereka ada yang mau bekerja di mana saja dan mau bekerja sambil belajar. Inilah satu alternatif dalam penanganan ARP dengan mengajak bekerja di samping belajar. Kemungkinan di atas merupakan "katup pengaman" penanganan masalah ARP di desa terpencil yang menyentuh inti masalah.

Tokoh masyarakat berpendapat, wajib belajar perlu diterapkan, sedang pemerintah membantu dana dan membantu kelancaran transportasi. ARP dilatih keterampilan serta diperketat dalam memberi ijin nikah atau pergi ke kota jika mereka belum lulus SLTP. Di samping itu, petugas perlu menerapkan pendekatan personal kepada warga.

Para tokoh setuju ARP dilatih suatu keterampilan (80%), dan diwajibkan bersekolah (20%). Mereka semua setuju ARP selain diberi pelatihan keterampilan, juga pendidikan mereka ditingkatkan. Pilihan yang tepat menurut tokoh masyarakat adalah anak ikut Paket B dan orang tua dibantu ternak (50%), anak bersekolah dan orang tua dibantu dana belajar (50%). Para pejabat tingkat kecamatan dan kabupaten berpendapat berbeda; mereka setuju ARP ikut SLTP Terbuka atau Paket B. Namun sebenarnya cara ini terbukti kurang efektif untuk desa terpencil. Paket A dan B kurang lancar meskipun seorang pejabat telah menjanjikan akan "meluluskan mereka asal mengikuti kegiatan belajar secara teratur".

Mengenai SMP Terbuka, dapat dicermati bahwa jumlah siswa SMP Terbuka di dukuh Otok kelas I ada 13 anak, kelas II ada 12 anak. Di dukuh Irut kelas I ada 4 anak, kelas II ada 8 anak; Ngumes I kelas I ada 4 anak dan kelas II ada 20 anak, sedang Ngumes II kelas I tidak ada dan kelas II ada 20 anak. Data di atas menunjukkan SMP Terbuka di kelas

satu rata-rata memiliki murid 10 anak dan di kelas II 13 anak. Hal itu berarti bahwa makin tahun anak yang ikut SMP Terbuka makin menurun, bahkan di Ngumes II pada tahun berikutnya tidak ada murid lagi. SMP Terbuka ternyata rawan putus belajar. Data di desa binaan menunjukkan bahwa dari daftar 12 ARP, semua adalah anak putus sekolah SMP Terbuka. Pelaksanaan SMP Terbuka banyak mengalami hambatan, yaitu anak tidak masuk tempat kegiatan belajar (TKB) pada saat ada pengajian (madrasah), tenaga guru hanya dari guru SD, serta pengelola hanya satu orang.

Informasi yang diperoleh adalah jumlah siswa yang ikut belajar di TKB berkisar 10 anak. Tutor atau Guru Pamong adalah guru SD negeri setempat, buku paket masih kurang, sehingga perlu giliran peminjam. Di samping itu motivasi anak rendah, waktu kegiatan tidak tepat, letak rumah ke TKB jauh, banyak putus belajar karena kawin, dan murid lulus dengan ditolong.

Pejabat ada yang berpendapat agar kepada lulusan SD baru diberitahu bahwa STTB belum diberikan dan mereka diwajibkan meneruskan sekolah dengan paket B atau SMP Terbuka. Hal ini akan memberi kesan bahwa mereka belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Kelemahan pengelolaan proyek dapat diatasi dengan adanya staf dan petugas yang terus berada di lapangan. Banyak petugas dibutuhkan agar pengawasan kontinu bisa dilakukan. Justru pengawasan inilah yang mampu menghadapi masalah budidaya ataupun belajar Paket A/B. Tidak akan terjadi kekurangan pakan itik atau pakan kambing, misalnya, sehingga hasil telur bahkan itik terpaksa dijual. Hal itu merupakan akibat pengelola kegiatan LSLD lama tidak berada di lokasi. Begitu pula rusaknya pembangkit listrik untuk belajar Paket B program LSLD tidak akan terjadi lama, karena cepat ditangani. Munculnya hama jagung hibrida atau kedelai, juga dapat cepat diatasi sebelum menghabiskan tanaman.

Kesulitan solusi ini adalah masalah dana awal yang cukup besar untuk menyiapkan sarana, prasarana dan fasilitas lain. Namun masalah ini bisa diselesaikan jika dapat digali dana UNESCO, pemerintah daerah dan mitra kerja. Dana dari Unesa untuk LSLD cukup besar, apalagi dibantu pemerintah daerah yang sampai saat ini berjalan. Senada dengan itu adalah pengalaman Universitas Wijaya Putra dalam mencari dana baik pemerintah daerah maupun dari swasta. Lebih menggembirakan lagi seorang kepala desa dari desa binaan LSLD bersedia menyediakan tanah dengan sewa di tempat strategis.

Kelemahan yang lain adalah keterpaduan dan koordinasi dengan dinas terkait. Pengalaman tim Kegiatan Peningkatan Pendapatan LSLD menunjukkan bahwa bupati atau gubernur perlu memberi perhatian khusus untuk solusi ini demi peningkatan pendidikan dan pembangunan desa. Kelemahan lain adalah rasa iri dari anak dan orang tua lain yang tidak termasuk ARP, yang ingin menjadi ARP agar bebas masalah dana sekolah. Begitu juga dengan orang kaya desa yang merasa iri. Penyelesaiannya adalah mereka bersama orang tua ARP dilatih mengenai budidaya yang cocok untuk dilaksanakan di desanya. Cara ini merupakan pengguliran keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. ARP yang sudah terlatih berbudidaya tertentu dapat mempraktikkannya di rumah bersama orang tuanya.

Kesulitan lain adalah adanya ARP yang tidak mau diasramakan. Kesulitan itu dapat dipecahkan dengan mengubah cara, misalnya ada ARP yang pulang ke rumah, tetapi jam kerja atau jam belajar diberlakukan ketat bagi mereka. Sebenarnya cukup banyak mereka yang mau tinggal di asrama dan kalau mereka dapat menginformasikan tinggal di asrama lebih baik dari pada di rumah, mereka yang enggan akan tertarik ikut ke asrama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anak rawan pendidikan (ARP) dapat ditangani dengan upaya melatih bekerja dan membelajarkan ARP dengan di beri insentif. Pengelolaan program dipimpin manajer profesional dengan bantuan staf ahli sesuai dengan budidaya yang dikelola. Ada tenaga staf tiap budidaya, yang dibantu petugas khusus dan ARP sebagai pelaksana. Pengawas dan evaluator memberi dana bekerja sama dengan khusus pemerintah daerah.

Ada kebaikan dari solusi ini di samping kelemahan. Kelemahan dapat diselesaikan dengan memanfaatkan pengalaman program yang sudah pernah ada. Koordinasi keterpaduan dan kontinuitas pengelolaan menunjang pemecahan kelemahan di atas. Dana awal dapat diupayakan bersama dan setelah berjalan diharapkan dapat membiayai diri sendiri. Solusi ini mengurangi jumlah ARP dan membantu masyarakat desa yang terpencil untuk berbudidaya sesuai dengan kemampuannya.

Saran

Solusi ini masih bersifat kajian awal yang dapat diteliti dan dikaji kembali baik rencana dan program, fasilitas, dana, sasaran, maupun metode dan personalianya. Studi kelayakan sangat disarankan sebelum dilaksanakan program. Perhatian khusus oleh pemerintah daerah demi keberhasilan pendidikan dan pembangunan desa di daerah terpencil sangat diperlukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adikara, R.T.S., Ismojowati, Soedarsih, Kirwani & Suryani, J. 1998. *Paket Percontohan Ayam Buras Untuk Peningkatan Pendapatan Peternak di Desa Binaan, Kabupaten Nganjuk dalam Rangka Menyukseskan WBPD*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Surabaya.
- Bernstein, A. 1987. *The Education for Urban Population*. New York: Random House.
- Chambers, R. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Terjemahan oleh Pepop Sudradjat. Jakarta: LP3ES.
- Coombs, P.H. & Ahmed, M. 1984. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Rajawali.
- Hardiyanto, Mursito, Budipramana, L.S., Hartoyo & Pitomo, S. 1998. *Pengembangan Potensi Ternak Kambing Masyarakat Tertinggal Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk Melalui Pengaturan Kawin Suntik*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Surabaya.
- Moersito, Hardiyanto, Pitomo, S., Adikara, R.T.S. & Nadjid, N. 1998. *Pengembangan Usaha Perikanan Kolam Air Deras sebagai Bekal Usaha Anak Rawan Sekolah di Desa Binaan Kab. Nganjuk dalam Rangka Menyukseskan WBPD*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Surabaya.
- Partosoedjono, S., Pitomo, S., Roesminingsih, M.V., Nadjid, N. & Djalal. 1995. *Penjajakan Kemungkinan Pelaksanaan Pengembangan Model Lintas Sektoral dan Lintas Disiplin untuk Menyukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Nganjuk*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Surabaya.
- Pitomo, S., Djokosujoso, S., Partosoedjono, S. & Soetrisno. 1992. *Kebutuhan Belajar Dasar Masyarakat Desa: Antara Real Need dan Felt Need (Studi Kasus di Tiga Propinsi)*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Surabaya.
- Pitomo, S., Samani, M., Musa, R., Soedjanarto & Budipramana, L.S. 1997. *Perintisan Pusat Pembelajaran Kerja dan Pendidikan Dasar (PPKDP): Suatu Cara Komprehensif di Kabupaten Nganjuk*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Surabaya.

- Hoesminingsih, M.V. 1993. *Survei tentang Penentuan Kecamatan Binaan di Kabupaten Lamongan*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Pusat Penelitian IKIP Surabaya.
- Hoebagyo, L.R., Barto, Muryanto & Haryati, A. 1993. *Laporan Penelitian Angka Transisi SD-SLTP di Propinsi Jawa Timur*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Jaringan Penelitian Jawa Timur.
- Noetrisno, R. 1995. *Upaya Pemerintah Tingkat II Nganjuk dalam Mengantisipasi Pelaksanaan Program Wajardiknas 9 Tahun*. Makalah disajikan dalam Pementapan Model Program LSLD dalam Menyukkseskan Wajardiknas 9 Tahun, IKIP Surabaya, Surabaya 19-20 Januari.
- Universitas Wijaya Putra. 1998. *Action Development Proposal, Pembangunan Desa Jombangdelik, Kec. Balong Panggang, Kab. Gresik, 1998*. Surabaya: Universitas Wijaya Putra.